

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. *Game Theory*

Aplikasi dari *game theory* merupakan terbilang pendekatan yang cukup baru dalam politik internasional, namun dalam periode terbaru pendekatan dengan menggunakan *game theory* mengalami peningkatan popularitas dalam penggunaannya. Teori ini sering kali di sangkut pautkan dengan pengaplikasian baru dari model permainan terhadap politik ekonomi internasional, dan penambahan aplikasi baru sebagai standar dari analisis strategis politik-militer. Namun yang menjadi dasar dari analisis strategis bukanlah subjek yang spesifik seperti masalah militer dan ekonomi, melainkan konsep dasar bagaimana memahami politik antar negara.

Game theory merupakan teori yang menganalisis bagaimana para aktor pembuat kebijakan (negara) melakukan interaksi dalam membuat keputusan untuk menelaah reaksi dan pilihan dari pembuat kebijakan yang lain. Salah satu keunggulan dari *game theory* terkandung dalam kapabilitasnya untuk memperluas ranah dari model aktor rasional melampaui batasan-batasan yang membatasi perspektif realisme tradisional ke dunia yang lebih kompleks di mana pusat perhatian tidak secara eksklusif pada masalah konflik dan lebih cenderung membahas masalah kerja sama (Sindal, 2016). Artinya, perluasan ini akan memberikan rangsangan kepada proyek teoritis yang sedang berlangsung untuk mengintegrasikan sisi militer dan politik-ekonomi di samping dari politik internasional.

Game Theory merupakan sebuah pendekatan yang efektif untuk digunakan dalam menentukan kebijakan dan strategi yang berkaitan

dengan pencapaian tujuan dan kepentingan nasional suatu negara. Dalam *Game Theory* setidaknya ada dua asumsi dasar yang dijelaskan, antara lain:

1. Aktor berperilaku rasional yaitu memilih strategi atas dasar pertimbangan untung-rugi dalam pencapaian tujuan yang jelas. Implikasi dari asumsi ini adalah bahwa para aktor dianggap punya kemampuan untuk mengetahui semua kemungkinan situasi yang dihadapi untuk menjabarkan urutan prioritas tujuan-tujuan yang hendak dicapai dan semua kemungkinan sumber daya yang dimiliki.
2. Aktor mempunyai kepentingan yang bertentangan walaupun hanya sebagian. Dengan demikian masing-masing aktor memiliki dua pilihan atau strategi. (Mas'oed, 1990)

Dalam pemikiran rasional tradisional realis, rasionalitas di dunia realis ini berpusat pada perebutan kekuasaan di lingkungan anarkis. Negara berjuang sendiri saat mereka mengejar kepentingan yang kontradiktif. Situasi konfliktual dalam hubungan internasional dan lingkungan yang menuntut untuk bertindak independen, akan menghasilkan kondisi hubungan antar aktor yang berujung pada *zero sum game*, di mana tidak adanya kemungkinan untuk melakukan kerja sama antar aktor.

Namun hal ini dibuktikan tidak sepenuhnya benar dalam aplikasi *Game Theory*. *Game theory* menjabarkan bahwasanya hal ini hanya akan berlaku apabila aktor yang ikut bermain hanya ada dua aktor saja yang dibangun secara artifisial. Dalam masalah internasional secara nyata, kepentingan negara tidak akan secara tepat dicirikan dengan menganggap negara oposisi secara murni memiliki kepentingan tersebut.

Dengan dasar tersebut, hal ini mengarah langsung ke rasionalitas strategis yang menggabungkan kesadaran mengejar kepentingan egois membutuhkan pertimbangan interaksi pilihan satu negara dengan pilihan

negara lain. Tidak ada negara yang dapat memilih strategi terbaiknya atau mencapai hasil terbaiknya terlepas dari pilihan yang dibuat oleh orang lain. Implikasi substantif terkait adalah bahwa pembuat kebijakan nasional perlu mengejar peluang untuk interaksi kooperatif bahkan ketika mereka berusaha melindungi dari interaksi yang konfliktual.

2.1.2. *Track One Diplomacy*

Track One Diplomacy” dapat diartikan sebagai diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah, atau sebuah teknik yang dilakukan oleh pemerintah yang secara esensial merupakan sebuah proses di mana komunikasi dari sebuah pemerintah/negara secara langsung kepada pemerintah yang lain. Track One Diplomacy dilakukan oleh perwakilan dari sebuah negara dan secara langsung masuk melakukan interaksi kepada kepala atau lembaga ofisial yang berwenang di pemerintahan/negara yang lain.

Track One Diplomacy merupakan jalur komunikasi yang terjadi secara resmi dan dilakukan oleh negara. Di sepanjang jalur resmi, Track one Diplomacy dapat terjadi secara bilateral diantara dua negara, atau secara multilateral ketika beberapa negara berinteraksi secara bersama, dan bahkan secara regional maupun global melalui jembatan organisasi antar pemerintah/organisasi Internasional. Sebagai contoh banyak dari kegiatan yang terjadi di dalam PBB dapat diklasifikasikan sebagai Global One Track Diplomacy.

Tujuan dan intensi dari Track One Diplomacy dapat berbagai macam bentuk. Track One Diplomacy dapat digunakan dengan cara yang koersif dan melibatkan sanksi, ultimatum dan intimidasi secara psikologis negara. Selain itu juga dapat digunakan secara persuasif yang melibatkan argumentasi dan negosiasi. Track One Diplomacy juga umum dapat digunakan sebagai sarana untuk menyesuaikan hubungan negara dan

pandangan antara satu negara dengan negara yang lain dengan melibatkan unsur persuasif (Lerche & Said, 1995).

Track One Diplomacy merupakan diplomasi yang bervariasi tidak hanya menurut berbagai peran yang dimainkan negara, tetapi juga menurut cara di mana peran diplomasi ini dilakukan. Interaksi resmi dapat dilakukan di tingkat kepala negara bagian senior, tingkat kementerian, atau melibatkan pejabat tingkat yang lebih rendah. Dalam negosiasi, negara dapat menggeser tingkat pejabat yang dikirim ke negosiasi sebagai sinyal tingkat komitmen untuk negosiasi.

Pada setiap tingkat interaksi, jenis interaksi dalam Track One Diplomacy berkisar dari komunikasi tertulis, pertemuan formal, hingga komunikasi informal. Dokumen tertulis yang berkaitan dengan perjanjian dapat dipertukarkan, diplomat dapat bertemu untuk membahas rancangan perjanjian secara formal, dan percakapan sampingan informal selama jeda dapat membawa komponen tambahan pada negosiasi.

Dalam resolusi konflik, Penerapan Track One Diplomacy untuk resolusi konflik dibentuk oleh jalinan hubungan internasional yang membentuk konteks konflik internasional. Dalam konteks ini, diplomat jalur satu mengambil banyak peran dan menggunakan teknik yang beragam. Diplomat dapat bertindak sebagai pihak utama dalam negosiasi, mendukung satu atau lebih pihak utama, atau bertindak sebagai pihak ketiga. Peran dalam diplomasi ini banyak terlibat dalam isu pengakuan secara resmi

2.1.3. Manajemen Konflik

Secara pengertian “konflik” menurut John W. Burton dapat didefinisikan sebagai sebuah situasi sebuah tantangan/kontradiksi dalam sebuah eksistensi norma, hubungan dan dalam penetapan dalam sebuah keputusan (Jeong, 2008). Perbedaan dalam eksistensi norma, maupun dalam penentuan sebuah keputusan yang diambil oleh dua aktor dan lebih

merupakan kondisi yang rentan dalam timbulnya sebuah konflik. Dari konflik tersebut dapat melahirkan hasil sebuah produk negatif yang dapat berujung pada sebuah kekerasan. Berdasarkan pengertian konflik dari Burton tersebut maka dapat didefinisikan bahwa manajemen konflik adalah sebuah usaha untuk mengatur dan membatasi aspek-aspek negatif yang terlahir dalam sebuah konflik, dan secara bersamaan meningkatkan aspek positif yang dapat terurai dari sebuah konflik.

Menurut Burton, manajemen konflik memiliki aplikasi yang luas. Burton menjelaskan bahwa salah satu fitur penting yang terkandung dalam manajemen konflik adalah sebuah upaya yang dimiliki oleh pemegang status quo untuk mengelola sebuah sengketa, dan menghindari eskalasi dari sebuah konflik (Thakore, 2013).

Secara ruang lingkup manajemen konflik dicakup dalam tiga ruang lingkup antara lain:

1. Pencegahan Konflik
2. Penghentian Konflik
3. Resolusi Konflik

Pencegahan konflik merupakan ruang lingkup di mana terdapat upaya-upaya untuk melakukan tindakan pencegahan dalam situasi risiko rawan konflik/ potensial terjadinya konflik. Hal ini dilakukan guna situasi yang memiliki potensi konflik tidak berlanjut menjadi konflik yang berujung pada kekerasan. Penghentian konflik merupakan ruang lingkup manajemen konflik diaman konflik sudah bereskalasi dan terjadi kekerasan dalam pihak yang terlibat konflik. Dan dalam manajemen konflik, resolusi konflik menjadi tahap akhir dalam upaya mengelola alur konflik yang terjadi.

Secara fungsi pada dasarnya konflik manajemen dan resolusi konflik memiliki tujuan yang berbeda. Konflik manajemen merupakan sebuah usaha untuk mereduksi efek negatif yang di timbulkan dari sebuah konflik dengan tujuan untuk mengurangi kekerasan yang terjadi. Sedangkan

resolusi konflik memiliki tujuan untuk melakukan eliminasi konflik dengan metode yang analitik dan mendapatkan akar dari konflik tersebut (Burton, 1993). Namun pada dasarnya konflik resolusi merupakan salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari ruang lingkup manajemen konflik.

Secara teori, manajemen konflik memiliki tujuan untuk mencapai sebuah perdamaian, namun dalam manajemen konflik, target akhir merupakan perdamaian negatif. Perdamaian negatif merupakan sebuah kondisi di mana tidak adanya segala jenis kekerasan (Galtung, 1996). Dengan adanya perdamaian negatif, situasi yang dapat berujung pada kekerasan dari pihak yang bersengketa dapat dihilangkan, dan dapat dididapkannya perdamaian positif, yang artinya merupakan kondisi di mana pihak yang bertikai memiliki sikap yang baik terhadap semua pihak, munculnya kebaikan secara verbal dan fisik, dapat dicapainya semua dasar kebutuhan untuk bertahan hidup, kebebasan dan identitas (Galtung, 1996)

2.1.4. Keamanan Nasional

Barry Buzan, seorang pakar dari Copenhagen School, mendefinisikan keamanan merupakan upaya untuk mengejar kebebasan dari ancaman dan kemampuan dari sebuah negara serta masyarakat untuk mempertahankan identitas independen dan integritas fungsional mereka untuk melawan sebuah kekuatan perubahan yang dianggap sebagai sebuah musuh. (Buzan, 1991). Pada intinya, keamanan merupakan kelangsungan hidup, tetapi juga secara masuk akal mencakup serangkaian substansial tentang kondisi keberadaan entitas.

Buzan menyatakan bahwa keamanan merupakan sebuah hasil dari konstruksi isu-isu yang menjadi masalah keamanan karena adanya sebuah *discourse content* yang setidaknya memberikan pengaruh bagi stabilitas keamanan (Buzan, 1991). Dalam bukunya yang berjudul *People, States and Fear*, Buzan membagi keamanan menjadi tiga level keamanan yang mencakup keamanan individu, keamanan negara, dan keamanan dalam

sistem internasional. Buzan juga melakukan kategorisasi sektor keamanan yang dibagi menjadi lima sektor yang antara lain mencakup militer, politik, lingkungan sosial dan ekonomi.

Ancaman politik mempresentasikan kehidupan yang konstan dan stabil dalam sebuah negara. Negara sebagai sebuah entitas politik, ancaman politik memiliki target untuk melemahkan entitas sebuah negara. Ancaman politik dapat dimunculkan dari perbedaan ideologi ataupun kepentingan aktor dan juga serangan terhadap sebuah negara.

2.2. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian metode kualitatif, terdapat adanya kecenderungan peneliti tidak akan melakukan pengkajian yang dalam dan luas untuk menghindari dari pengaruh pemikiran ahli dalam literatur tersebut yang memungkinkan munculnya kekhawatiran yang dapat menimbulkan bias pada perspektif penelitian yang sedang dilakukan. Literatur yang digunakan untuk menonjolkan urgensi dari topik penelitian yang sekaligus mendukung hasil penelitian dari peneliti (Bandur, 2016).

Topik yang diambil oleh peneliti adalah bagaimana Indonesia dapat secara efektif strategi pencegahan internasionalisasi konflik Papua melalui *Track One Diplomacy* Dalam Bidang Politik. Penjelasan mengenai penelitian yang terdahulu ditampilkan dalam tabel di bawah:

No	Peneliti	Judul dan Tahun	Uraian Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	1. Zulkifli Hi Manna 2. Drs. Muhadi Sugiono, MA	Implikasi Internasionalisasi terhadap Penyelesaian Permasalahan di Papua Pasca Orde Baru (2015)	Penelitian ini menguraikan tentang Implikasi dari adanya internasionalisasi permasalahan di Papua dapat mengganggu stabilitas keamanan dan Hak Asasi Manusia di Indonesia	Persamaan penelitian adalah obyek kasus tentang internasionalisasi konflik Papua yang akan membawa ancaman keamanan nasional dari Indonesia. Perbedaan dari penelitian penulis menjabarkan secara luas tentang upaya pemerintah meredam internasionalisasi konflik Papua
2.	Adriana Elisabeth	Dimensi Internasional Kasus Papua	Penelitian ini menjabarkan tentang kebijakan-kebijakan aktor internasional dalam upaya internasionalisasi konflik Papua serta menjabarkan dimensi internasional kasus Papua	Persamaan yang terkandung di dalamnya adalah penelitian tersebut menjabarkan bahwa konflik Papua menaruh kepentingan asing di dalamnya sehingga aktor internasional mengupayakan adanya intervensi asing. Perbedaan yang mendasar terdapat pada subyek yang dijabarkan dalam

				penelitian. Dalam penelitian tersebut subyek yang dijabarkan adalah semua aktor internasional.
3.	Ahmad Sabir	Diplomasi Publik Indonesia terhadap Vanuatu dalam Upaya Membendung Gerakan Separatisme Papua	Penelitian ini menjabarkan tentang upaya diplomasi Indonesia terhadap Vanuatu untuk membendung opini gerakan separatisme di Papua	Persamaan dari penelitian ini adalah adanya pembahasan tentang bagaimana negara asing memperburuk citra Indonesia dengan merefleksikan konflik Papua. Perbedaan dari penelitian ini ada pada subjek pada penelitian ini yang membahas dari sudut pandang Indonesia secara politik
4.	Julian Alec McKinlay King	A Soul Divided: The UN's Misconduct Over West Papua	Penelitian ini menjabarkan tentang sikap PBB terhadap konflik Papua yang berujung pada salah langkahnya PBB terhadap Papua	Persamaan dari penelitian ini terdapat pada subyek yang terfokus pada PBB. Perbedaan yang ada dalam penelitian adalah sudut pandang yang diambil.

5.	Maire Leadbeater	Conflict in West Papua: The contrast between historic and contemporary media coverage in New Zealand	Penelitian ini menjabarkan tentang konflik di Papua yang dilandaskan aspek historis dan bagaimana media di New Zealand mengkaji konflik di Papua	<p>Persamaan pada penelitian ini adalah pembahasan secara historis dari konflik Papua dalam latar belakang.</p> <p>Perbedaan adalah subyek yang diambil adalah negara. Serta dalam penelitian ini konstruksi ide diberikan pada masyarakat pada suatu negara</p>
----	------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.3. Kerangka Pemikiran

